

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Terbaru. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Diterjemahkan oleh Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Riewanto, Agus, dkk. *Hukum Tata Negara*. Edisi 1, Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Jurnal

Arsil, Fitra. "Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi tentang Fungsi Pengawasan DPR terhadap Eksekutif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 412–438.

Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1–20.

Efendi, Muhammad Fadli. "Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Politik Hukum." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 345–390.

Guswara, Arrafi Bima, dan Ali Imran Nasution. "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1195–1210.

Linz, Juan J. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990): 51–69.

- Septiana. "Analisis Kewenangan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu: Antara Diskresi Eksekutif dan Kontrol Konstitusional." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 70–85.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. "Disfungsi Pengawasan Parlemen terhadap Pembentukan Hukum Eksekutif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 20–38.
- Syahuri, Taufiqurrahman, dan Rianda Dirkareshza. "Pembatasan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Perppu." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 401–420.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di Tengah Oversized Coalition." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023): 710–725.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Laporan, Dokumen Resmi, dan Siaran Pers

Indrayana, Denny. "Tidak Mencabut Perppu Ciptaker, Presiden Lagi-Lagi Melanggar Konstitusi." Catatan Hukum, 23 Februari 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Antisipasi Geopolitik dan Ekonomi Global." Siaran Pers, 30 Desember 2022.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. "Tidak Disetujui DPR pada Masa Sidang III, Perppu Cipta Kerja Harus Dicabut." Siaran Pers, 15 Februari 2023.

Artikel Internet dan Media Daring

Databoks Katadata. "Tujuh Presiden Indonesia Pernah Terbitkan Perppu." Diakses pada 20 Maret 2026. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/7a8a046d0272247/tujuh-presiden-indonesia-pernah-terbitkan-perppu.

Detik News. "Begini Peta Kekuatan DPR 2019-2024, Koalisi Jokowi Dominan." Diakses pada 20 Maret 2026. https://news.detik.com/berita/d-4728867/begini-peta-kekuatan-dpr-2019-2024-koalisi-jokowi-dominan.

Hukumonline. "Persetujuan Perppu Cipta Kerja di DPR Tak Bulat." Diakses pada 20 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/persetujuan-perppu-cipta-kerja-di-dpr-tak-bulat-lt6419763197aa0/.

